

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencapaian tujuan suatu organisasi sangat tergantung kepada ada tidaknya kerja sama antara atasan dan bawahan. Artinya keberhasilan pimpinan dalam membawa/memimpin organisasi kepada tujuan yang diinginkan sangat bergantung kepada bawahannya. Jadi seorang pimpinan dalam jenis organisasi apapun, baik swasta maupun organisasi pemerintah tidak akan mungkin akan berhasil tanpa bantuan bawahan.

Semakin besar suatu organisasi maka masalah-masalah yang dihadapi akan semakin banyak dan kompleks. Untuk itu maka pimpinan memerlukan bantuan orang lain dalam menangani sebagian dari tugas-tugasnya yang banyak dan kompleks tersebut. Kebutuhan akan bantuan orang lain ini menimbulkan suatu kebijaksanaan yang harus diambil oleh pimpinan organisasi tersebut. Kebijakan ini menyangkut masalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada bawahan, yang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari koordinasi. Bila pimpinan organisasi mengabaikan masalah koordinasi maka tugas pimpinan akan menjadi berat sehingga dapat mengakibatkan penimbunan tugas yang tidak terpikul. Hal ini berarti tugas-tugas yang dianggap begitu penting tidak dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya karena semua pekerjaan diurus oleh pimpinan.

Dalam prakteknya kita sering menemukan adanya keengganan dalam hal pelaksanaan koordinasi ini, karena terdapatnya rasa kesanggupan yang tinggi dari

pimpinan untuk melaksanakan semua tugasnya sehingga merasa rugi untuk mengikutkan bawahan atau memang tidak mengerti manfaat dari pelimpahan tugas dan wewenang.



Seorang pimpinan harus menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh manusia baik keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang mengharuskan kita untuk berhubungan dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di samping pemimpin harus sadar akan keterbatasan tersebut, maka bawahan juga harus siap dan yakin dalam menerima dan menjalankan wewenang yang dilimpahkan pimpinannya.

Demikian halnya dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal mencapai tujuannya tidak mengenyampingkan pentingnya peranan dari koordinasi tersebut. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi pemerintah yang banyak berhubungan dengan segala aktivitas administrasi di bidang pemerintahan adalah sangat mutlak memerlukan perwujudan pelimpahan tugas dan wewenang sehingga menciptakan koordinasi kerja yang baik.

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu hal yang sangat tepat bila kita melihat lebih jauh arti dari koordinasi itu sendiri, yaitu :

“ koordinasi dari pada atasan terhadap bawahan agar supaya terdapat pembagian kerja/pekerjaan dalam menjalankan tugas, sehingga segala pekerjaan itu dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan “. ¹

¹ Sukarna, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 37-38.